LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN 2021



SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI, PELAPORAN

PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II

Jl. Jenderal Sudirman Salido No. 158 Painan

Tip/ Fax : (0756) 465215 / (0756) 465216 Email : painan_pn@yahoo.com

Webelte - want na nelson as le

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, maka Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Painan Kelas II Tahun 2021 telah selesai disusun.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Painan Kelas II Tahun 2021 ini disusun berdasarkan surat dari Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3111/SEK/OT.01.2/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 Tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 yang ditujukan kepada Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI Dan Para Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Banding Dan Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Padang nomor W3.U/7/RPA/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 Tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Dan Penyampaian Dokumen SAKIP Yang Ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Se Sumatera Barat.

Laporan ini menguraikan secara deskriptif mengenai pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Painan Kelas II Tahun 2021 yang meliputi tugas pokok dan tugas penunjang, yaitu bidang teknis yustisial, administrasi kepaniteraan, administrasi kesekretariatan, bidang pengawasan, serta bidang pengadaan sarana dan prasarana fisik.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Painan Kelas II Tahun 2021 ini kami sajikan, dengan harapan dapat memberikan manfaat dan informasi yang berguna bagi kita semua, dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Painan, 10 Januari 2022

Ketua Pengadilan Negeri Painan Kelas II

Muhamad Fauzan Haryadi, SH. MH

P. 19780215 200112 1 002



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN NOMOR: W3.U9/ /KP/SK/I/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2021 PENGADILAN NEGERI PAINAN

KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3111/SEK/OT.01.2/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 :
- b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Negeri Painan perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Negeri Painan;
- c. bahwa mereka para petugas yang tercantum dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Painan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan tersebut.

Mengingat :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3
 Tahun 2009;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49
 Tahun 2009;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14
 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI

PAINAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2021 PENGADILAN NEGERI

PAINAN.

Pertama : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan

penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

tahun 2021 Pengadilan Negeri Painan;

Kedua : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua

Pengadilan Negeri Painan di lingkungan

Pengadilan Negeri Painan;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal

ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan Pada tanggal 04 Januari 2022 KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN

MUHAMAD FAUZAN HARYADI, S.H., M.H. N.P. 19780215 200112 1 002 LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN

NOMOR: W3.U9/ /KP/SK/I/2022 TANGGAL: 04 JANUARI 2022

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2021 PENGADILAN NEGERI PAINAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	M. FAUZAN HARYADI, SH, MH	Ketua	Pelindung/ Penasehat
2.	Dr. RIYA NOVITA, SH., MH.	Hakim	Pengarah
3.	DONI EKA PUTRA, SH., MH.	Panitera	Ketua tim
4.	DESMINA SIMAMORA, SH	Sekretaris	Koordinator
5.	DIMAS MARESKA, S.H	Kasubag PTIP	Sekretaris
6.	MANUJU P. MANIK, SH	Staf Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	FADLIA S., S.E.	Kasubag kepegawaian, organisasi dan tata laksana	Anggota
8.	APRILIANA RIZKI NUR LESTARI, A.Md.	CPNS/fungsional arsiparis	Anggota

Ditetapkan di Painan Pada tanggal 04 Januari 2022 KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN

MUHAMAD FAUZAN HARYADI, S.H., M.H. NIP. 19780215 200112 1 002

DAFTAR ISI

Kata pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar	i ii iii iv
BAB I PENDAHULUAN a. Latar Belakang b. Struktur Organisasi c. Tugas Pokok Dan Fungsi	1 2 4
BAB II KEADAAN PENGADILAN a. Keadaan Perkara Di Pengadilan Negeri Painan b. Penyelesaian Perkara	12
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus 2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu 3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 4. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 5. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Pk 6. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi 7. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi c. Akreditasi Penjaminan Mutu 1. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) 2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu 3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	13 14 14 15 15 15 16 17 18
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) a.1 Mutasi a.2 Promosi a.3 Pensiun a.4 Pendidikan Dan Pelatihan Hakim Dan Pegawai	19 20 21 21 22
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA, TEKNOLOGI INFOR	RMASI
a. Pengelolaan Keuangan	23
b. Pengelolaan Sarana Dan Prasaranac. Pengelolaan Teknologi Informasi	24 27
c.1 Implementasi e-Court	29
c.2 Implementasi Sipp	31
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	
a. Akreditasi Penjaminan Mutu	34
b. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	45
c. Inovasi Pelayanan Publik	47
BAB V PENGAWASAN	
a. Internal	54
b. Evaluasi	59
BAB VII PENUTUP	
a. Kesimpulan	61
b. Rekomendasi	62

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

- 1. Surat Keputusan tim penyusun laporan pelaksana kegiatan tahun 2021
- 2. Rangkaian Kegiatan Selama Tahun 2021

Daftar Tabel

Tabel 2.1 : Matriks Keadaan Perkara Tahun 2021	12
Tabel 2.2 : Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus	13
Tabel 2.3 : Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu	13
Tabel 2.4 : Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum banding	14
Tabel 2.5 : Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi	14
Tabel 2.6 : Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum pk	15
Tabel 2.7 : Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi	15
Tabel 2.8: Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi	15
Tabel 2.9: Matriks Jumlah Masyarakat Pencari Keadilan yang Menggunakan Layanan Posbakum	16
Tabel 2.10 : matrix sidang diluar gedung pengadilan tahun 2021	17
Tabel 2.11 : matrix perkara prodeo pn painan tahun 2021	17
Tabel 3.1 : Hakim dan Pegawai	18
Tabel 3.2 : Mutasi Hakim dan Pegawai Masuk	19
Tabel 3.3 : Mutasi Hakim dan Pegawai Keluar	19
Tabel 3.4 : Promosi Pegawai masuk	19
Tabel 3.5 : Promosi Pegawai keluar	20
Tabel 3.6 : Daftar Pegawai Pensiun	20
Tabel 3.7 : Rekapitulasi Diklat Hakim dan Pegawai	20
Tabel 4.1 : Pengelolaan Keuangan	21
Tabel 4.2 : Data Tanah dan Bangunan Gedung	22
Tabel 4.3 : Matriks Sarana/Prasarana kantor	23
Tabel 4.4 : Data Rumah Dinas	25
Tabel 4.5 : Daftar Kendaraan Dinas	25
Tabel 4.6 : Keadaan Teknologi Informasi dan Pendukungnya	28
Tabel 5.1: akreditasi penjamin mutu pn painan	40
Tabel 5.2 : matrix pengawasan	53
Tabel 5.3 : matrix evaluasi	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Gedung Pengadilan negeri painan	
Gambar 1.2 : Struktur Organisasi	3
Gambar 2.1 : sertifikat akreditasi penjamin mutu pn painan	16
Gambar 2.2 : Penyerahan MoU POSBAKUM	17
Gambar 4.1 : aplikasi sistem transparansi pengadilan negeri painan	27
Gambar 4.2 : penayangan video E-Court pada videotron pemda pessel	29
Gambar 4.3 : cuplikan layar evaluasi implementasi sipp pn painan	30
Gambar 5.1 : panjar biaya perkara perdata pn painan tahun 2021	32
Gambar 5.2 : opening meeting APM, RB, ZI WBK dan WBBM	41
Gambar 5.3 : pelatihan peningkatan mutu PTSP bersama BRI	42
Gambar 5.4 : mesin antrian Pelayanan Terpadu Satu Pintu	42
Gambar 5.5 : pembinaan Petugas Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu	43
Gambar 5.6 : Tampilan Layar informasi dan Aplikasi antrian PTSP	43
Gambar 5.7 : audio anti grafitikasi	44
Gambar 5.8 : survey kepuasan masyarakat	44
Gambar 5.9 : shortcut hotspot internal pengadilan negeri painan	45
Gambar 5.10 : aplikasi Antrian pelayanan terpadu satu pintu	45
Gambar 5.11 : halaman login khusus petugas ptsp	46
Gambar 5.12 : tampilan layar informasi pengadilan negeri painan	46
Gambar 5.13 : tampilan layar antrian PTSP untuk pengunjung	47
Gambar 5.14: sms center pengadilan negeri painan	47
Gambar 5.15 : aplikasi panggilan sidang pengadilan negeri painan	48
Gambar 5.16 : landing page & informasi cepat pn painan	48
Gambar 5.17 : whatsapp business pengadilan negeri painan	49
Gambar 5.18 : survey IKM dan IPK menggunakan Kios K PN painan	50
Gambar 5.19: sidang pidana online menggunakan teleconference	50

SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGADILAN NEGERI PAINAN

BAB I

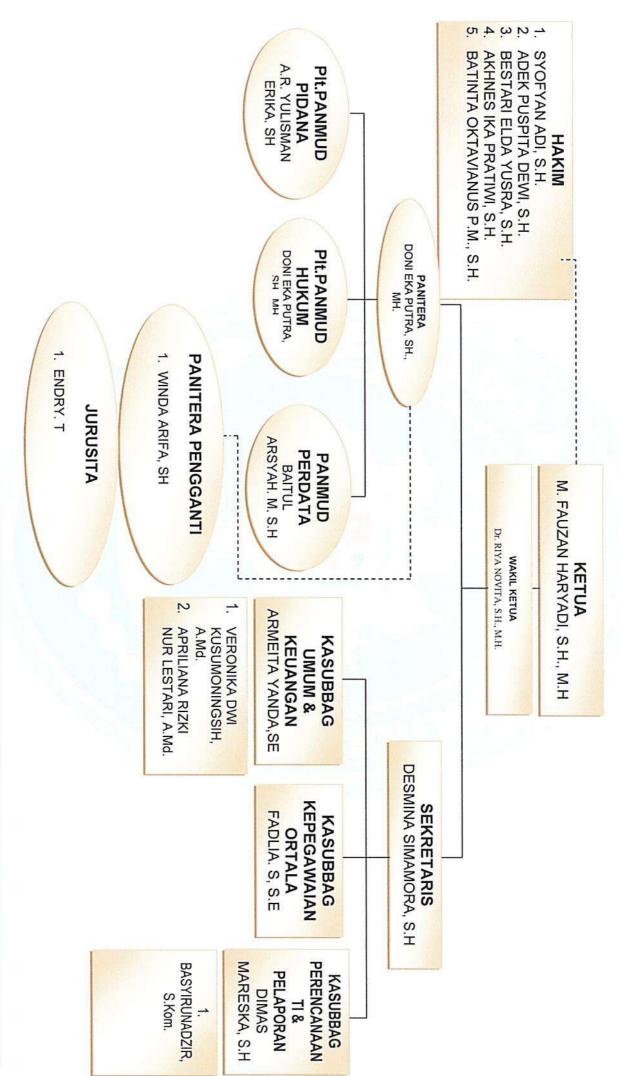
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

- a) Dalam rangka mewujudkan good governance dan accountability untuk terciptanya budaya kerja yang profesional, transparan, efisien dan efektif, maka setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan harus dilaporkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku I Pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan);
- b) Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3111/SEK/OT.01.2/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 Tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 yang ditujukan kepada Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI Dan Para Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Banding Dan Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan;
- c) Surat Ketua Pengadilan Tinggi Padang nomor W3.U/7/RPA/I/2021 tanggal 03 Januari 2021 Tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Dan Penyampaian Dokumen SAKIP Yang Ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Se Sumatera Barat;

2. STRUKTUR ORGANISASI

Pengadilan Negeri Painan Kelas II sebagai Peradilan Tingkat Pertama yang merupakan salah satu dari wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang sebagai garis depan Mahkamah Agung R.I yang memberikan pelayanan hukum kepada Masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, Sumber Daya Manusia yang ada pada Pengadilan Negeri Painan dapat tergambar dalam susunan Struktur Organisasi sebagai berikut : (Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Painan, terlampir).



A. Penyusunan Alur Tupoksi

Pengadilan Negeri Painan, sebagai badan peradilan tingkat pertama, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara baik perkara Pidana maupun perkara Perdata di tingkat pertama.
- Menerima permohonan Bandung, kasasi, Peninjauan Kembali dalam perkara perdata dan pidana serta permohonan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi dalam perkara pidana.
- Menyelesaikan pemberkasan perkara, baik berkas bundel A maupun berkas bundel B dan mengirimkannya ke tingkat lanjutannya sesuai dengan upaya hukum yang ditempuh.
- Melaksanakan putusan (eksekusi) dalam perkara perdata.
- Tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Undang-undang dan Peraturan yang berlaku.

Disamping tugas pokok sebagaimana tertera diatas, Pengadilan Negeri Painan berfungsi sebagai berikut :

- Menjaga agar pelaksanaan tugas pokok lembaga peradilan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengendalikan dan membina agar pelaksanaan tugas teknis dan administrasi Peradilan dilaksanakan secara tertib dan dikelola sebagaimana mestinya.
- Meningkatkan terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi masyarakat terutama bagi para pencari keadilan yang meliputi penyelesaian perkara yang cepat dan biaya ringan, sehingga tercipta lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa.

Penyusunan Alur Tupoksi pada Pengadilan Negeri Painan dapat tergambarkan sebagai berikut :

1. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan:

- Ketua Pengadilan selaku pimpinan bersama-sama dengan Wakil Ketua memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas pengadilan secara baik dan lancar.
- Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua serta bekerja sama dengan baik.
- Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keselarasan dan kerja sama antar sesama pejabat dan petugas yang bersangkutan.
- Menyelenggarakan administrasi keuangan rutin/pembangunan.
- Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dengan seluruh karyawan Pengadilan dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Dinas.

2. Hakim:

- Menetapkan hari sidang perkara pedata dan pidana.
- Menyelesaikan setiap perkara yang ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap pada saat diucapkan dipersidangan.
- Menandatangani putusan yang sudah diucapkan di persidangan.
- Menetapkan terdakwa ditahan dirubah jenis tahanannya.
- Menandatangani BAP oleh hakim ketua.

3. Panitera:

- Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya, di lingkungan kepaniteraan.
- Mengatur pembagian tugas pejabat kepaniteraan.
- Panitera dengan dibantu oleh Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan perkara perdata. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.
- Tugas dan fungsi lainnya sebagaimana diatur dalam Perma No 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

4. Panitera Pengganti:

- Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- Membuat penetapan penahanan atau serta membuat berita acara sidang dan melaporkan kalau ada titipan barang bukti kepada Panitera.
- Melaporkan kepada panitera muda perdata maupun pidana tentang penundaan hari sidang, menyerahkan berkas perkara bila telah selesai diminutasi.

5. Panmud Hukum:

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
- Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, daftar Notaris, Penasihat Hukum, serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundangundangan.

6. Panmud Pidana:

- Melaksanakan tugas di Kepaniteraan Pidana sebagai Koordinator di Kepaniteraan Pidana.
- Membantu Hakim dalam persidangan penyelesaian perekara pidana.
- Menyerahkan berkas perkara kepada Panmud Hukum untuk disimpan diarsip jika telah selesai diminutasi.
- Menyusun rencana kerja pada bagian pidana.

7. Panmud Perdata:

- Melaksanakan tugas di Kepaniteraan Perdata sebagai Koordinator di Kepaniteraan Perdata.
- Membantu Hakim dalam persidangan penyelesaian perekara
 Perdata.
- Menyerahkan berkas perkara kepada Panmud Hukum untuk disimpan diarsip jika telah selesai diminutasi.
- Menyusun rencana kerja pada bagian Perdata.

8. Jurusita:

- Melaksanakan tugas kejurusitaan Pengadilan antara lain pemangggilan untuk hari sidang baik sidang perkara perdata dan pidana juga panggilam somasi;
- Melaksanakan Pemberitahuan putusan baik perkara perdata dan pidana;
- Melaksanakan Sita Jaminan dan Eksekusi yang telah ditetapkan oleh Hakim / Ketua Pengadilan Negeri.

9. Staf Pidana:

- Mengisi Register Banding, Kasasi dan PK.
- Membuat Laporan Bulanan.
- Mengisi Daftar Hari Sidang.

10. Staf Perdata:

- Menerima uang panjar perkara.
- Melaporkan pemasukan dan pengeluaran uang setiap hari kepada panitera untuk dicatat dalam buku induk keuangan.
- Menyerahkan penerimaan hak-hak kepaniteraan kepada bendahara penerima seminggu sekali.

11. Staf Hukum:

- Membantu Panitera Muda Hukum untuk membuat laporan bulanan, triwulan, semester dan pelaksanaan kegiatan tahun secara berkala.
- Menyimpan berkas perkara yang sudah non aktif ke tempat penyimpanan perkara.

12. Sekretaris:

- Membantu pimpinan Pengadilan dalam hal tugas pokok dan fungsi bagian Kesekretariatan;
- ➤ Menyusun DIPA;
- Menetapkan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan, PPSPM dan Panitia/Pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran/keuangan;
- Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
- Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
- Mengawasi penata usahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- Tugas dan fungsi lainnya sebagaimana diatur dalam Perma No 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

13. Kasubag Umum dan Keuangan:

- > Tata Persuratan
- Pengadaan Barang Inventaris
- Melaksanakan pemeliharaan (bangunan, kendaraan, peralatan& mesin)

- Pengelolaan Perpustakaan
- Usulan penghapusan
- Pengawasan tenaga honorer
- Permintaan dan Pencairan remunerasi
- Permintaan dan Pencairan Belanja Pegawai
- Permintaan dan Pencairan Belanja Barang
- Permintaan dan Pencairan Belanja Modal
- Menyusun laporan Umum dan Keuangan
- Menginput data dalam aplikasi Umum dan Keuangan

14. Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana:

- Mengusulkan kenaikan pangkat
- Membuat usulan Promosi jabatan Struktural dan fungsional
- Mengusulkan Calon Pegawai menjadi Pegawai Negeri Sipil
- Membuat surat izin cuti Hakim dan Pegawai
- Membuat kenaikan gaji berkala.
- Membuat usulan-usulan pejabat fungsional maupun struktural.
- Membuat realisasi biaya pindah.
- Membuat SKP.
- Membuat laporan kepegawian.
- Membuat Bezetting Hakim dan Pegawai
- Menginput data ke dalam aplikasi kepegawaian
- Membuat Absensi Hakim dan Karyawan

15. Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan:

- Perencanaan anggaran / penyusunan RKA KL
- Penyusunan laporan Kesekretariatan

- Penyusunan perencanaan kerja dan perencanaan anggaran
- Pemeliharaan jaringan dan website
- koordinasi, konsultasi dan evaluasi kinerja
- Pemeliharaan aplikasi baik Kesekretariatan maupun Kepaniteraan

16. Staf Umum:

- Membuat Daftar Barang Ruangan.
- Mengelola surat-surat dinas.
- Memelihara Kebersihan, keamanan kantor dan jalannya persidangan.
- Melayani permintaan, kebutuhan dan perlengkapan kantor.

17. Staf Keuangan:

- Membantu Kepala Urusan dalam melaksanakan tugas seharihari tentang keuangan.
- Membuat daftar gaji.
- Membuat laporan bulanan dan triwulan.
- Menata arsip keuangan.

18. Staf Kepegawaian:

- Membantu Kepala Urusan dalam melaksanakan tugas seharihari tentang kepegawaian.
- Membuat absensi pegawai/hakim.
- Laporan bulanan
- Menata arsip kepegawaian.
- Tugas, pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan kepegawaian.

BAB II

KEADAAN PENGADILAN

A. KEADAAN PERKARA

Selama Tahun 2021 Keadaan Perkara Pada Pengadilan Negeri Painan dapat digambarkan sebagai berikut :

Matrix keadaan perkara perdata tahun 2021

no	klasifkasi	sisa tahun lalu	jumlah perkara masuk	total perkara	jumlah putus tepat waktu	jumlah putus tidak tepat waktu	total putus	sisa
1	gugatan	21	58	79	52	6	58	24
2	gugatan sederhana	0	6	6	6	0	6	0
3	permohonan	1	11	12	12	0	12	0
4	perlawanan/derden verzet	0	2	2	1	0	1	1
	total	22	77	99	71	6	77	25

Matrix keadaan perkara pidana tahun 2021

no	klasifkasi	sisa tahun lalu	jumlah perkara masuk	total perkara	jumlah putus tepat waktu	jumlah putus tidak tepat waktu	total putus	sisa
1	pidana biasa	26	206	232	197	0	197	35
2	pidana singkat	0	0	0	0	0	0	0
3	pidana cepat	0	18	18	18	0	18	0
4	pelanggaran lalu lintas	0	2976	2976	2976	0	2976	0
5	praperadilan	0	1	1	11	0	1	0
6	perikanan	0	0	0	0	0	0	0
7	tipikor	0	0	0	0	0	0	0
8	pidana anak	1	10	11	11	0	11	0
	total	27	3211	3238	3203	0	3203	35

B. PENYELESAIAN PERKARA

i. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Matrix sisa perkara perdata tahun 2021

no	klasifkasi	sisa perkara tahun 2020	putus tahun 2021
1	gugatan	21	21
2	gugatan sederhana	0	0
3	permohonan	1	1
4	perlawanan/derden verzet	0	0
	total	22	22

Matrix sisa perkara pidana tahun 2021

no	klasifkasi	sisa perkara tahun 2020	putus tahun 2021
1	pidana biasa	26	26
2	pidana singkat	0	0
3	pidana cepat	0	0
4	pelanggaran lalu lintas	0	0
5	praperadilan	0	0
6	perikanan	0	0
7	tipikor	0	0
8	pidana anak	1	1
	total	27	27

ii. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Matrix perkara perdata putus tepat waktu tahun 2021

no	klasifkasi	sisa 2020 & 2021	putus tidak tepat waktu
1	gugatan	45	52
2	gugatan sederhana	0	6
3	permohonan	1	12
4 perlawanan/derden verzet		1	1
	total	47	71

Matrix perkara pidana putus tepat waktu tahun 2021

no	klasifkasi	sisa 2020 & 2021	putus tidak tepat waktu
1	pidana biasa	61	0
2	pidana singkat	0	0
3	pidana cepat	0	0
4	pelanggaran lalu lintas	0	0
5	praperadilan	0	0
6	perikanan	0	0
7	tipikor	0	0
8	pidana anak	0	0
	total	61	0

iii. Keadaan Perkara Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali

Matrix perkara perdata banding tahun 2021

nomor	klasifkasi	putus	banding	tidak banding
1	gugatan	52	8	44
2	gugatan sederhana	6	0	6
3	permohonan	12	0	12
4	perlawanan/derden verzet	1	0	1
	total	71	8	63

Matrix perkara pidana banding tahun 2021

nomor	klasifkasi	putus	banding	tidak banding
1	pidana biasa	197	12	185
2	pidana singkat	0	0	0
3	pidana cepat	18	0	18
4	pelanggaran lalu lintas	2976	0	2976
5	praperadilan	1	0	1
6	perikanan	0	0	0
7	tipikor	0	0	0
8	pidana anak	11	2	9
	total	3203	14	3189

iv. Keadaan Perkara Kasasi Dan Peninjauan Kembali

Matrix perkara perdata kasasi tahun 2021

nomor	klasifkasi	jumlah putusan banding	mengajukan kasasi	tidak mengajukan kasasi
1	gugatan	6	2	4
2	gugatan sederhana	0	0	0
3	permohonan	0	0	0
4	perlawanan/derden verzet	0	0	0
	total	6	2	4

Matrix perkara pidana kasasi tahun 2021

nomor	klasifkasi	jumlah putusan banding	mengajukan kasasi	tidak mengajukan kasasi
1	pidana biasa	7	3	4
2	pidana singkat	0	0	0
3	pidana cepat	0	0	0
4	pelanggaran lalu lintas	0	0	0
5	praperadilan	0	0	0
6	perikanan	0	0	0
7	tipikor	0	0	0
8	pidana anak	2	0	2
	total	9	3	6

v. Keadaan Perkara Peninjauan Kembali

Matrix perkara perdata peninjauan kembali tahun 2021

no	klasifkasi	jun	nlah putusa	in	yang i	yang mengajukan PK			tidak mengajukan PK		
no	Kiasiikasi	pertama	banding	kasasi	pertama	banding	kasasi	pertama	banding	kasasi	
1	gugatan	52	6	0	0	0	0	52	6	0	
2	gugatan sederhana	6	0	0	0	0	0	6	0	0	
3	permohonan	12	0	0	0	0	0	12	0	0	
4	perlawanan/derden verzet	- 1	0	0	0	0	0	1	0	0	
	total	71	6	0	0	0	0	71	6	0	

Matrix perkara pidana peninjauan kembali tahun 2021

no	klasifkasi	jun	ılah putusa	ın	yang r	yang mengajukan PK			nengajuka	n PK
no	Kiasiikasi	pertama	banding	kasasi	pertama	banding	kasasi	pertama	banding	kasasi
1	pidana biasa	197	7	0	0	0	0	197	7	0
2	pidana singkat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	pidana cepat	18	0	0	0	0	0	18	0	0
4	pelanggaran lalu lintas	2976	0	0	0	0	0	2976	0	0
5	praperadilan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	perikanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	tipikor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	pidana anak	11	2	0	0	0	0	11	2	0
	total	3202	9	0	0	0	0	3202	9	0

vi. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi

	PERK	ARA YANG	BERHASIL	MEDIASI	Molecule 5
JUMLAH PERKARA PERDATA YANG	JUMLAH PERKARA PERDATA YANG	STATU	S KEBERHASI	LAN MEDIASI	DALAM PROSES
DIMEDIASI TH. 2021	BERHASIL DIMEDIASI TH. 2021	BERHASIL	TIDAK BERHASIL	TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN	ANOSES
44	4	4	34	1	5

vii. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

		PERKARA YA	NG BERHA	SIL DIVER	SI			
NO	JUMLAH PERKARA PIDANA	JUMLAH PERKARA	PERKARA		S KEBERHASILAN DIVERSI			
	ANAK	DIVERSI	BERHASIL	TIDAK BERHASIL	TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN	PROSES		
1	10	10		9	0	0		

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Pengadilan Negeri Painan Kelas II telah mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan Prediket A "Excellent" yang sertifikatnya secara resmi diserahkan pada tanggal 28 s.d 29 November 2017 lalu adalah tekat bulat agar dapat terus meningkatkan pelayanan publik dan kinerjanya di masa yang akan datang, sesuai dengan motto Pengadilan Negeri Painan Kelas II : "PAINAN", yakni: Profesional, Akuntabel, Integritas, Nyaman, Asri, Netral, maka dengan pencapaian yang telah diperoleh tersebut Pengadilan Negeri Painan Kelas II akan semakin berusaha untuk melakukan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat pencari keadilan.



i. Pos Bantuan Hukum

	POSBAKUM		
SATUAN	JUMLAH ANGGARAN POSBAKUM (Rp.)	REALISASI AN POSBAKI	
KERJA		(Rp.)	(%)
PN PAINAN KELAS II	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00



POSBAKUM 2021

ii. Sidang keliling/pelayanan terpadu

SIDANG KELILING / DI LUAR PENGADILAN									
SATUAN KERJA	JUMLAH ZITTING PLATE	LOKASI SIDANG ZITTING PLATE	JUMLAH PERKARA DISELESAIKAN DI ZITTING PLATE TH. 2021						
PN PAINAN KELAS II	1. BALAI SELASA	JALAN PELANGAI GADANG	2						



iii. Perkara prodeo (pembebasan biaya perkara)

	PRODEC			
SATUAN KERJA	JUMLAH PERKARA PRODEO DISELESAIKAN TH. 2021	JUMLAH ANGGARAN PRODEO (Rp.)	REALISAS ANGGARA PRODEO	
			(Rp.)	(%)
PN				
PAINAN				
KELAS II	0	0	0	0

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Berikut ini Keadaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Painan Kelas II per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Matrix keadaaan pegawai pn painan tahun 2021

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	PENDIDIKAN
1	MUHAMAD FAUZAN HARYADI, S.H, M.H.	PEMBINA	KETUA	S2 HUKUM
	NIP. 19780215 200112 1 002	(IV/a)		
2	RIYA NOVITA, S.H., M.H.	PEMBINA TK.I	WAKIL KETUA	S2 HUKUM
	NIP. 19761107 200012 2 001	(IV/b)		
3	SYOFYAN ADI, S.H., M.H.	PENATA MUDA TK.I	HAKIM	S2 HUKUM
- 1	NIP. 19880703 201712 1 002	(III/b)		
4	BESTARI ELDA YUSRA, S.H., M.H.	PENATA MUDA TK.I	HAKIM	S2 HUKUM
	NIP. 19920321 201712 2 004	(III/b)		Emile Of
5	AKHNES IKA PRATIWI, S.H., M.Kn.	PENATA MUDA TK.I	HAKIM	S2 HUKUM
	NIP. 19930615 201712 2 002	(III/b)		
6	ADEK PUSPITA DEWI, S.H	PENATA MUDA	HAKIM	SI HUKUM
	NIP. 19890923 201712 2 001	(III/a)		
7	BATINTA OKTAVIANUS P MELIALA, S.H	PENATA MUDA	HAKIM	SI HUKUM
	NIP. 19941025 201712 1 003	(III/a)		
8	DONI EKA PUTRA, S.H., M.H.	PENATA TK.I	PANITERA	S1 HUKUM
	NIP. 19811217 200912 1 003	(III/d)		
9	DESMINA SIMAMORA, S.H.	PENATA TK.I	SEKRETARIS	S1 HUKUM
	NIP. 19720120 199203 2 001	(III/d)		
10	HAVIZA. M, S.H.	PENATA TK.I	PANMUD	S1 HUKUM
	NIP. 19710313 199303 2 001	(III/d)	HUKUM	
11	BAITUL ARSYAH. M, S.H, M.H.	PENATA TK.I	PANMUD	S2 HUKUM
i de la	NIP. 19740402 199303 1 001	(III/d)	PERDATA	

12	ARMEITA YANDA, S.E.	PENATA	KASUBBAG	SI EKONOMI
	NIP. 19780519 200912 2 002	(III/c)	UMUM DAN KEU	
13	DIMAS MARESKA, S.H	PENATA	KASUBBAG	SI HUKUM
	NIP. 19830310 200604 1 003	(III/c)	PTIP	
14	FADLIA. S, S.E.	PENATA	KASUBBAG	S1 EKONOMI
	NIP. 19850413 200904 2 006	(III/c)	KORTALA	
15	BENNY HAMDANI, S.H.	PENATA	PANITERA	SI HUKUM
	NIP. 19870515 200604 1 002	(III/c)	PENGGANTI	
16	AR YULISMAN ERIKA, S.H	PENATA	PANITERA	SI HUKUM
	NIP. 19851202 201212 1 001	(III/c)	PENGGANTI	
17	WINDA ARIFA, S.H.	PENATA	PANITERA	S1 HUKUM
	NIP. 19900815 201212 2 002	(III/c)	PENGGANTI	
18	ENDRY. T	PENATA MUDA TK.I	JURUSITA	SMA
	NIP. 19650727 199103 1 004	(III/b)		
19	BASYIRUNADZIR, S.Kom	PENATA MUDA	PRANATA KOMPUTER	SI KOMPUTER
	NIP. 19941126 202012 1 007	(III/a)		Mili.
20	VERONIKA DWI K, A.Md	PENGATUR TK.I	BENDAHARA	DIII
	NIP.19891013 201503 2 003	(II/d)		KOMPUTER
21	APRILIANA RIZKI NUR LESTARI, A.Md	PENGATUR	ARSIPARIS	DIII
	NIP.19891013 201503 2 003	(II/c)		KEARSIPAN

Mutasi

TABEL MUTASI MASUK

NO	NAMA	UK	
NO	NAMA	JABATAN	DARI PENGADILAN
1	DONI EKA PUTRA, S.H., M.H	PANITERA	PN PARIAMAN
2	RIYA NOVITA, S.H., M.H	WAKIL KETUA	PN PONTIANAK
3	WINDA ARIFA, S.H	PANITERA PENGGANTI	PN RANAI

Value of the second sec		

TABEL MUTASI KELUAR

NO	NAMA KELUAR					
NO	NAMA	JABATAN	KE PENGADILAN			
1	GUSMANIDA, S.H	PANITERA	PT PADANG			
2	FERYANDI, S.H	HAKIM	PN PADANG SIDEMPUAN			
3	SUKMA TRIANA SARI, S.H	PANITERA MUDA PIDANA	PN PADANG SIDEMPUAN			

> Promosi

TABEL PROMOSI MASUK

NO	NAMA	PRO	MOSI
NU	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	BASYIRUNADZIR, S.Kom	<u>-</u>	CPNS/PRANATA KOMPUTER
2	APRILIANA RIZKI NUR LESTARI, A.Md	-	CPNS/ARSIPARIS

TABEL PROMOSI KELUAR

NAMA	PRO	MOSI
IVAIVIA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
-		-
	NAMA -	NAMA PROD JABATAN LAMA

> Pensiun

TABEL PENSIUN

No.	Nama	Jabatan	TMT PENSIUN
-		-	

	Diklat	(SDM	teknis/no	n teknis	yang to	elah	mengi	kuti	diklat	
--	--------	------	-----------	----------	---------	------	-------	------	--------	--

TABEL YANG MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS

No.	Nama	Jabatan	Mengikuti Diklat	Waktu
1	DESMINA SIMAMORA, S.H	SEKRETARIS	BIMTEK KEPEGAWAI & KEUANGAN	3 Hari
2	ARMEITA YANDA, S.E	KASUBBAG UMUM & KEUANGAN	BIMTEK KEPEGAWAI & KEUANGAN	3 Hari
3	VERONIKA DWI KUSUMONINGSIH, A.Md	BENDAHARA	BIMTEK KEPEGAWAI & KEUANGAN	3 Hari
4	BASYIRUNADZIR, S.Kom	PRANATA KOMPUTER	LATSAR CPNS GOL III	647 Jam
5	APRILIANA RIZKI NUR LESTARI, A.Md	ARSIPARIS	LATSAR CPNS GOL II	647 Jam
6	DIMAS MARESKA, S.H	MARESKA, S.H KASUBBAG PTIP PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR MA		797 jam
7	DONI EKA PUTRA, S.H., M.H.	PANITERA	BIMTEK KEPANITERAAN & KESEKRETARIATAN	3 Hari
8	DESMINA SIMAMORA, S.H	SEKRETARIS	BIMTEK KEPANITERAAN & KESEKRETARIATAN	3 Hari
9	BAITUL ARSYAH. M, S.H., M.H	PANMUD PERDATA	BIMTEK KEPANITERAAN & KESEKRETARIATAN	3 Hari
10	ARMEITA YANDA, S.E	KASUBBAG UMUM & KEUANGAN	BIMTEK KEPANITERAAN & KESEKRETARIATAN	3 Hari

TABEL YANG MENGIKUTI DIKLAT NON TEKNIS

No	Nama	Jabatan	Mengikuti Diklat	Waktu
				oii ji i i i i i i i i i i i i i i i i i

1	

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. PENGELOLAAN KEUANGAN

Bahwa pada Tahun Anggaran 2021, Pengadilan Negeri Painan mendapatkan anggaran dari 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yaitu DIPA Nomor: SP DIPA-005.01.2.098807/2021 dan DIPA Nomor: SP DIPA-005.03.2.099210/2021 tanggal 12 November 2020. Dengan perincian sebagai berikut:

a) REALISASI ANGGARAN DIPA 01 DAN DIPA 03

	REALISASI DIPA 01							
NO		PAGU ANGGARAN	REALISAS ANGGARA	FOU.	SISA ANGGAR	AN		
			Rp.	%	Rp.	%		
1	BELANJA PEGAWAI	2.442.632.000	2.440.684.254	99.92	1.947.746	0,08		
2	BELANJA BARANG	1.049.912.000	1.033.947.956	98.48	15.964.044	1,52		
3	BELANJA MODAL	37.500.000	37.500.000	100	0	0		
REALISASI DIPA 03								
NO		PAGU	REALISAS	SI	SISA			
NO		ANGGARAN	ANGGARAN		ANGGAR	AN		
E. S			Rp.	%	Rp.	%		
1	BELANJA BARANG	`104.928.000	101.185.000	96.43	3.743.000	3.57		

2. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Penyediaan gedung yang layak dan refresentatif bagi Pengadilan mempunyai arti yang sangat penting mengingat bahwa Pengadilan adalah suatu instansi yang secara langsung melayani masyarakat. Apabila dihubungkan dengan fungsi/tujuan Pengadilan sebagai tempat para pencari keadilan. Tersedianya gedung yang baik dan mampu menampung semua kegiatan Pengadilan akan menciptakan suasana tenang dan tertib, serta meningkatkan kewibawaan Pengadilan.

Pada Pengadilan Negeri Painan Tata Ruang Gedung telah ditata sesuai dengan kebutuhan yang ada. adapun ruangan-ruangan yang ada pada Gedung Induk Pengadilan Negeri Painan yaitu :

a) SARANA/PRASARANA GEDUNG KANTOR

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1	Ruang Ketua	1	hakim
2	toilet ketua	1	
3	Ruang Wakil Ketua	1	
4	ruang hakim	1	
5	toilet hakim	1	
6	Ruang Panitera	1	panitera
7	ruang kepaniteraan pidana	1	
8	ruang kepaniteraan perdata	1	
9	ruang kepaniteraan hukum	1	
10	ruang jurusita	1	
11	ruang arsip	1	
12	Ruang Sekretaris	1	sekretaris
	ruang sub bagian umum keuangan	1	
14	ruang sub bagian perencanaan, teknologi informasi, pelaporan	1	
15	ruang sub bagian kepegawaian, organisasi, tata laksana	1	
16	ruang server	1	
17	ruang pustaka	1	
18	Ruang Sidang Utama	1	perkara
19	ruang sidang atas	1	STATE OF
20	ruang sidang anak	1	
21	ruang mediasi	1	
22	ruang tahanan pria	1	
23	ruang tahanan wanita	1	
24	ruang tunggu anak	1	
25	ruang polisi	1	
26	ruang jaksa	1	MESSIN
27	ruang hakim anak	1	MILES AND S
28	ruang kesehatan	1	publik
29	ruang tunggu terbuka hijau	1	
30	mushola	1	
31	toilet pegawai pria	1	
	toilet pegawai wanita		
33	gudang	1	
34	ruang tamu terbuka	1	
	ruang posbakum	1	

Page 24 of

36	ruang pelayanan terpadu satu pintu	1
37	ruang laktasi	1
38	toilet pengunjung pria	1
39	toilet pengunjung wanita	1
40	kantin	1
41	lapangan tenis	1
42	garasi mobil dinas	1
43	garasi motor pegawai	1

Catatan:

- Semua Ruangan dalam kondisi baik dan layak pakai.
- Perlu adanya Ruang tambahan untuk tempat penyimpanan barang bukti dan penyimpanan barang-barang inventaris yang rusak.

Disamping Gedung Induk, Pengadilan Negeri Painan juga memiliki gedung tempat sidang tetap (Zitting Plaatsen) di luar gedung induk Pengadilan Negeri Painan yang berjarak \pm 80 km. dengan kondisi gedung tempat sidang tetap Baik dan layak pakai.

b) SARANA/PRASARANA KANTOR

O	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
10	enset	1	LANKO W. L. CONTROL OF THE CONTROL O
216	emari besi	26	
3 16	emari kayu	26	
4 ra	ak besi	25	
5 fi	ling kabinet besi	13	
6 b	rankas	4	
7 n	nobile file	2	
8 ta	abung pemadam api	5	
9 c	ctv	1	
10 p	apan nama	2	
11a	lat penghancur kertas	1	
12 n	nesin absensi	1	
13 n	neja kerja kayu	70	
14 k	ursi besi	116	
15 k	ursi kayu	23	
16 s	ice	2	
17b	angku panjang besi	9	

18 bangku panjang kayu	7	
19 meja rapat	2	
20 meja resepsionis	1	
21 meja telepon	1	
22 meubelair lainnya	3	
23 jam elektronik	13	
24 vacum cleaner	2	
25 lemari es	3	
26 ac standing	4	
27 ac split	30	
28 kipas angin	10	
29 televisi	2	
30 sound system	1	3
31 mic conference	2	
32 kaca hias	6	
33 dispenser	13	
34 palu sidang	3	
35 lambang instansi	1	
36 ups	15	
37 camera digital	1	
38 pabx	1	
39 facsimile	1	
40 lan	1	
41 komputer jaringan lainnya		mon
42 pc unit	38	
43 laptop	14	
44 printer	17	
45 scaner	3	
46 peralatan pc lainnya	1	
47 server	2	Will st
48 router	1	
49 rak server	1	
50 monografi	5.586	

		KENDARAAN I	DINAS		1	1
NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI			
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	*KET
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1	station wagon	2008	V			
2	Minibus innova	2005	√			
3	Minibus kijang	2001			1	
4	Minibus avanza	2014	V			

5	Minibus innova				
II	Jenis Kendaraan Roda 2	and the state of t			
1	Mega Pro	2008	1		
2	Bebek supra x r	2007	1		
3	Bebek shogun	2005	1		
4	Bebek supra x	2005	1		
5	Bebek supra x	2005	1		
6	Bebek supra	2002	1		
7	Bebek fit x	2005		1	
8	suzuki a100	1996		1	

	Г	RUMA	H DIN	AS		
		JUMLAH	KONDISI			
NO	URAIAN		BAIK	RUSAK RINGAN	ASSESSED AND WARRANT OF THE PERSONS	KETERANGAN
1	Rumah Dinas Ketua	1		V		
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	1			
3	Rumah Dinas Hakim	1	1			
4	Rumah Dinas Hakim	1	1			
5	Rumah Dinas Hakim	1	1			
6	Rumah Dinas Hakim	1	1			
7	Rumah Dinas Hakim	1	V			
8	Rumah Dinas Hakim	1	1			
9	Rumah Dinas Panitera	1	1			
10	Rumah Dinas Sekretaris	1	1			
11	rumah dinas ziting plats	1			1	

3. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Publikasi Perkara (One day publish)

Pengadilan Negeri Painan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas transparansi informasi, dengan salah satu cara yaitu dibuatnya website Pengadilan Negeri Painan dengan alamat : http://pn-painan.go.id/webpn/. yang dapat diakses langsung oleh masyarakat pencari keadilan, juga masyarakat juga dapat memantau perkembangan perkara di http://sipp.pn-painan.go.id/

Sedangkan untuk akses informasi di lingkungan kerja Pengadilan Negeri Painan pada saat ini telah disediakan akses internet ke jaringan speedy serta dilengkapi dengan jaringan LAN antar komputer sehingga seluruh ruangan yang ada sudah dapat mengakses internet, sedangkan untuk masyarakat umum dapat menggunakan wireless Wifi di lingkungan Pengadilan Negeri Painan.

Melalui website resmi Pengadilan Negeri Painan ini nantinya diharapkan masyarakat akan dapat mengakses langsung Informasi yang dibutuhkan, data yang ditampilkan di website akan disesuaikan dengan petunjuk yang telah ditetapkan dan akan di up date selalu.

Untuk itu Pengadilan Negeri Painan saat ini sedang berusaha meningkatkan mutu dari informasi yang akan ditayangkan pada website tersebut.

Selain itu Pengadilan Negeri Painan juga meluncurkan Aplikasi berbasis Android yaitu Aplikasi PN Painan Mobile yang dapat di download melalui playstore. Pada Aplikasi ini menampilkan fitur-fitur guna untuk transparansi informasi publik diantara fitur-fitur tersebut adalah: Website Pengadilan Negeri Painan

PN PAINAN MOBILE adalah aplikasi yang dirancang untuk memudahkan para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Painan untuk mendapatkan informasi dengan sangat mudah melalui Smartphone dalam genggaman

CARA MENDAPATKAN

Anda bisa mendapatkan aplikasi PN Painan Mobile dengan mengunduh melalui Google Playstore yang ada di Smartphone Android Anda.

MENU APLIKASI

Pengaduan Online

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Survey Kepuasan Masyarakat

Survey Indeks Persepsi Korupsi

Survey Kepuasan Harian Masyarakat

JDIH - MA RI

Evaluasi Dirjen

Website Pengadilan Tinggi Padang

Perpustakaan Pengadilan Negeri Painan

Pada menu ini anda akan sangat mudah mendapatkan informasi - informasi seputar Pengadilan Negeri Painan

Jadwal Sidang

Pada menu ini anda bisa melihat Jadwal Sidang yang akan dilaksanakan pada hari yang anda ingin lihat.

Informasi Tilang

Pada menu ini anda akan sangat dimudahkan untuk mendapatkan informasi secara detail mengenai informasi tilang yang ingin anda cari.

E-Court

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.

Dan masih banyak lagi menu - menu pada Aplikasi PN Painan Mobile ini yang dapat memudahkan anda, Berikut adalah menu - menu lainnya :

Merupakan layanan yang memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri yang secara otomatis terhubung ke Pengadilan Negeri yang dituju TAMPILAN LAYAR DARI APLIKASI PENGADILAN NEGERI PAINAN MOBILE PADA PLATFORM ANDROID



TEKNOLOGI INFORMASI YANG MENDUKUNG SIPP

1. PERANGKAT KERAS

NO	NAMA PERANGKAT	JUMLAH MERK/ SPESIFIKASI		KETERANGAN
1	Server	2	fujitsu 1330 M4 dan Fujitsu 1330 M1	
2	Microtic	1	RB 450	
3	Komputer	18	Fujitsu, hp, lenovo	
4	Laptop	5	hp,dell,Fujitsu, lenovo	
5	Switch	1	Tp-link 24 port	
6	Scanner 2 Fujitsu		Fujitsu	

2. JARINGAN

NC	NAMA PERANGKAT	JUMLAH	MERK/ SPESIFIKASI	KETERANGAN
1	Jaringan LAN	18	TP link 24 port/ Mikrotik RB 450	
2	Jaringan Internet	3	speedy 100 Mbps & cinox 50 Mbps	
3	Acces point	6	Unifi & tp link	

3. PERANGKAT LUNAK

NO	NAMA PERANGKAT	JUMLAH	MERK/ SPESIFIKASI	KETERANGAN
1	Website	ı	pn-painan.go.id (unlimited hosting)	
2	E-court	1		
3	Antivirus	5	Avast security 3 th	
4	Aplikasi	5	panggilan sidang, antrian PTSP, Survey kepuasan	
			sms center, whatsapp chat boot web	

4. PUBLIKASI PERKARA

NO	NAMA PERANGKAT	JENIS PUBLIKASI	MERK/ SPESIFIKASI	KETERANGAN
1	SIPP	Publikasi perkara ang sedang ditangani	Versi	http:/ sipp.pn- painan.go.id
2	JDIH	Publikasi dokumentasi dan informasi hukum		
3	Direktori putusan	Pn painan derektori putusan Mahkamah agung		
4				
5	dst			

Page 30 of

a) IMPLEMENTASI E-COURT DI PENGADILAN NEGERI PAINAN



PENAYANGAN VIDEO E COURT PADA
VIDEOTRON PEMDA KABUPATEN PESISIR SELATAN

b) Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP

Dengan telah berjalanan Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Painan, dan dengan didukung oleh perangkat yang telah memadai, hal ini akan sangat menunjang dalam pelaksanaan one day publish, tidak lagi menunda-nunda semua informasi khususnya untuk informasi perkara, masyarakat akan dapat mengakses informasi yang dibutuhkan dengan cepat, mudah dan transparan.

"One Day Publish" adalah maklumat palayanan kepada publik bahwa Mahkamah Agung akan mempublish informasi perkara pada hari yang sama dengan perkara tersebut diputus. Mahkamah Agung juga akan mempublish putusan pada hari yang sama dengan perkara tersebut dikirim ke pengadilan pengaju.

Pengadilan Negeri Painan sebagai ujung tombak Mahkamah Agung juga berkewajiban yang sama dalam penyelesaian perkara dan pelayanan informasi kepada masyarakat, turut serta dan mendukung program one day publish tersebut.

Saat ini Avatar menyediakan beberapa informasi yang bisa didapatkan oleh para penggunanya, berikut kata kunci yang bisa digunakan untuk mendapatkan informasi melalui Chat Whatsapp ke Avatar :

Untuk Informasi mengenai perkara dan denda tilang di Pengadilan Negeri Painan
Untuk Informasi mengenai tata cara berlangganan notifikasi jadwal sidang dan sisa
biaya perkara jika kurang dari Rp.100.000 di Pengadilan Negeri Painan
Untuk Informasi mengenai layanan di Pengadilan Negeri Painan
Untuk Informasi mengenai anggaran di Pengadilan Negeri Painan
Untuk Informasi mengenai statistik perkara di Pengadilan Negeri Painan
Untuk Informasi mengenai berperkara secara elektronik di Pengadilan
Untuk Informasi mengenai surat keterangan tidak pernah di pidana, dll.
Untuk Informasi mengenai kinerja SIPP Pengadilan Negeri Painan

TENTANG AVATAR

Avatar (Asisten Virtual Aplikasi Teknis dan Kesekretariatan) adalah merupakan Aplikasi yang berbasis Whatsapp Bot yang dimana akan memberikan informasi secara otomatis yang bisa diakses melalui aplikasi Chat Whatsapp.

Aplikasi ini meminimalisir mobilitas para Pencari Keadilan di Era Pandemi untuk datang secara fisik ke kantor.

Dalam hal ini bagi para Pencari Keadilan yang jaraknya cukup jauh dari Pengadilan Negeri Painan, juga dapat menghemat waktu dan biaya dengan menggunakan aplikasi ini.

Tidak hanya itu, informasi mengenai pengadilan ini pun dapat diakses kapanpun dan dimanapun diluar jam operasional Pengadilan Negeri Painan.

Aplikasi yang dibentuk oleh Pengadilan Negeri Painan ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan pencarian informasi mengenai Pengadilan secara efektif dan efisien.

Untuk Informasi mengenai hasil evaluasi SIPP Pengadilan Negeri Painan di Badilum

Untuk Informasi mengenai prosedur pengaduan di Pengadilan

Untuk Informasi mengenai hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan

Untuk Informasi mengenai situasi penyebaran CORONA atau COVID-19 di Indonesia Anda juga bisa menanyakan informasi lainnya seperti perkara banding, kasasi dan lainnya. Namun jika informasi yang Anda cari tidak tersedia, kami akan mempelajarinya lebih lanjut, agar kedepan informasi tersebut tersedia untuk Anda

MENU AVATAR

Perkara

Langganan

Layanan

Anggaran

Statistik

Ecourt

Suket

Kinerja

Evaluasi

Pengaduan

Survei

Corona



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Sejalan dengan semangat perubahan reformasi birokrasi pada Mahkamah Agung dan jajarannya, Pengadilan Negeri Painan sebagai kawal depan dari Mahkamah Agung tentunya juga harus selalu berusaha menjadikan setiap individunya sebagai agent perubahan demi peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat luas.Pada Pengadilan Negeri Painan juga selalu berusaha untuk melaksanaan Reformasi Birokrasi pada Area:

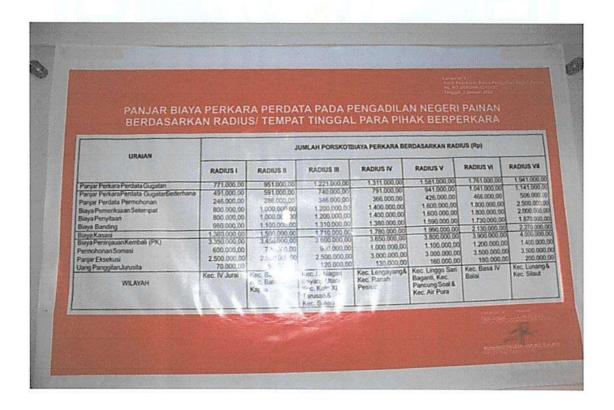
1. Manajemen Perubahan

Bahwa Pengadilan Negeri Painan tentunya akan selalu berusaha dan berupaya untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan manajemen, sejalan dengan program yang telah dicetuskan oleh Mahkamah Agung R.I tentang manajemen perubahan, perubahan tentunya ke arah yang lebih baik. Setiap kita hendaknya menjadi agent perubahan itu sendiri, tidak lagi tinggal diam tetapi harus berperan aktif. Banyak terobosan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Painan dalam hal Manajemen Perubahan baik dalam administrasi ataupun tentang pelayanan langsung kepada masyarakat pencari keadilan.

2. Perundang-undangan

Bahwa Pengadilan Negeri Painan, setiap melakukan kebijakan dan mengambil keputusan tentunya harus ada payung hukum yang tepat dan pasti, sedangkan tentang penetapan yang berlaku baik untuk internal kantor maupun bagi masyarakat umum, Pengadilan Negeri Painan telah membuat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Painan, seperti terlampir pada

halaman sebelumnya. Hal ini diharapkan menjadi salah satu rumusan untuk kepastian hukum yang berlaku internal kantor dan berlaku juga untuk masyarakat luas dalam hal-hal tertentu. Sebagai contoh dalam hal penatapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor: W3.U9/01/HK.02/I/2021, tertanggal 04 Januari 2021 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Berdasarkan Radius Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Painan, Penatapan ini merupakan salah satu sarana dimana masyarakat luas dapat secara langsung menghitung sendiri dan memperkirakan biaya perkara secara transparan sehingga tidak ada lagi prasangka seolah-olah ditutup-tutupi, karena setiap yang berbau biaya (keuangan) sifatnya sangat sensitif sudah tidak zamannya lagi adanya mafia peradilan dalam berproses di Pengadilan pada umumnya.



PANJAR BIAYA PERKARA PENGADILAN NEGERI PAINAN TAHUN 2021

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Bahwa Pengadilan Negeri Painan dalam Tahun 2021 banyak mengalami perubahan Struktur Organisasi, sebagaimana tertera pada Bab terdahulu, mutasi promosi tidak saja bagi Ketua, Wakil Ketua, Hakim tetapi juga mencakup pejabat struktural dan pejabat fungsional, pergantian Ketua, Wakil Ketua dan mutasi Hakim baik yang datang ataupun meninggalkan Pengadilan Negeri Painan hal tersebut sudah menjadi hal yang biasa dan tidak akan menurangi kinerja khususnya pelayanan kepada masyarakat. Kesemua perubahan dan perombakan tersebut diatas tentunya merupakan

Kesemua perubahan dan perombakan tersebut diatas tentunya merupakan salah satu wujud dari Penataan dan Penguatan Organisasi khususnya pada Pengadilan Negeri Painan. Dalam istilah "the right man on the right place", sehingga diharapkan akan lebih meningkatkan kualitas kinerja yang dihasilkan dari sebelumnya.

4. Penataan Tata Laksana

Dengan adanya perubahan struktur Pengadilan, maka pembagian tugas-tugas semakin terperinci sehingga penataan tata laksana pada Pengadilan Negeri Painan akan selalu terus diupayakan ke arah yang lebih baik. Bahwa Pengadilan Negeri Painan saat ini telah menyusun semua Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi masing-masing bidang pekerjaan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Penyusunan SOP tersebut sangat berguna sebagai acuan dan pedoman dalam hal penyelesaian tugas seharihari.

Dalam hal pelayanan kepada masyarakat, Pengadilan juga telah menetapkan standar pelayanan di Pengadilan Negeri Painan, sebagaimana yang telah

ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor: W3-U9/527/KPN/SK/I/2015 tertanggal 2 Januari 2014 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Sehingga setiap memberikan pelayanan kepada masyarakat harus secara transparan dan memuaskan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Pelayanan secara langsung ataupun lewat tampilan yang ada pada web site Pengadilan Negeri Painan melalui situs: pn-painan.info, dan juga masyarakat dapat memantau setiap perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Painan melalui SIPP.pn-painan.info. sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Painan telah ikut menjalankan program pemerintah khususnya dibidang keterbukaan informasi publik. Masyarakat dapat secara langsung mengakses baik di kantor ataupun di tempat-tempat lain melalui internet untuk kemudahan masyarakat pencari keadilan khususnya.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Pelaksanaan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) bertujuan untuk membangun system penilaian kinerja bagi para pegawai berdasarkan kinerja yang diharapkan dapat dinilai dengan menggunakan sistem yang baku sehingga dapat menjamin obyektifitasnya. Dengan pelaksanaan sistem manajemen SDM ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi seluruh pegawai dalam perjalanannya mengembangkan karir dimana pegawai akan memiliki acuan yang pasti dalam pengembangan sesuai dengan kompetensinya. Keberhasilan Reformasi Birokrasi secara umum dititik beratkan pada SDM yang berkualitas. Diharapkan dengan adanya sistem ini dapat membantu manajemen dalam menerapkan sistem pemberian hukuman memudahkan manajemen penghargaan ataupun dan

dalam perencanaa, pengembangan dan pembinaan SDM pada lingkungan kantor dimana dia bekerja.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur pada masing-masing kantor;
- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur pada masing-masing Kantor;
- Meningkatnya disiplin SDM Aparatur pada masing-masing Kantor;
- 4. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur;
- Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur pada masing-masing Kantor.

6. Penguatan Akuntabilitas

Penguatan akuntabilitas kinerja mencakup penguatan akuntabilitas kinerja organisasi. Pengadilan Negeri Painan telah menyusun dan menetapkan panduan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Kinerja organisasi Pengadilan Negeri Painan untuk Tahun 2021 setelah melakukan evaluasi dengan penilaian terhadap pencapaian outcome dari program dan kegiatan yang direncanakan setiap tahun dalam bentuk IKU. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan tentang IKU ditetapkan setiap tahunnya dan dijabarkan menjadi target capaian dalam dokumen Penetapan Kinerja setiap tahun. IKU Pengadilan Negeri Painan ditindaklanjuti Berdasarkan dokumen Penetapan Kinerja, maka pada akhir tahun anggaran/awal tahun anggaran berikutnya disusun dokumen LKjIP.

Dalam area perubahan ini, Pengadilan Negeri Painan juga akan melakukan Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja. Dokumen Sistem Akuntabilitas IKU, Perjanjian Kinerja, Penetapan Kinerja, dan diharapkan Panduan Pelaporan Kinerja dipahami, dilaksanakan dan hasilnya terdokumentasi. Pengadilan Negeri Painan setiap tahunnya selalu berupaya melakukan peningkatan kinerja sehingga dalam setiap laporan-laporan yang disajikan akan tergambar karena hal ini akan dapat dijadikan pedoman untuk penyusunan laporan pada tahun-tahun seterusnya, pada bagian mana yang perlu penyempurnaan maka akan terus dilakukan penyempurnaan.

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah tersusun, yang meliputi Renstra,

7. Penguatan Pengawasan

Penguatan Pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing K/L. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- 1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara;
- 2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
- 3. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara;
- 4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

Penguatan organisasi diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pimpinan dalam melakukan penugasan dan koordinasi dikarenakan tidak adanya duplikasi tugas dan fungsi dari unit kerja dan masing-masing jabatan. Dengan penguatan pengawasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi menjadi lebih tepat dan cepat sesuai rencana tahapan.

Bahwa pada Pengadilan Negeri Painan dalam hal pengawasan telah membuat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Painan tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang, yang akan bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bidang masing-masing. Dan juga untuk Pengadilan tingkat pertama juga selalu mendapatkan pengawasan langsung dari Pengadilan Tinggi serta dari Mahkamah Agung selaku Pengawas Internal, dan juga mendapat pengawasan langsung dari BPK, BPKP, Ombusman, dan lembaga atau instansi lainnya yang bertindak untuk melakukan pengawasan kinerja.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Berbagai upaya pun terus dilakukan oleh Pengadilan Negeri Painan, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang meliputi :

a. Peningkatan kualitas perilaku dan keprofesionalan aparatur pemerintah.

Peningkatan kualitas dan keprofesionalan aparatur pemerintah adalah salah satu strategi dalam menciptakan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Sebab dewasa ini, keluhan-keluhan yang datang dari masyarakat yang menilai pelayanan publik yang diberikan kepada mereka terkendala akibat masih belum tingginya sikap atau perilaku sumber daya manusia aparatur yang langsung berhadapan dengan masyarakat.

Rendahnya tingkat kualitas sumber daya manusia aparatur dan keprofesionalan pegawai ini juga mengakibatkan sering terjadinya diskriminasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagian besar masyarakat ada yang menerima pelayanan itu dengan maksimal akan tetapi sebagian lagi hanya mendapatkan pelayanan yang sekedarnya.

Karena itulah peningkatan sumber daya manusia dan profesionalitas pegawai menjadi suatu aspek yang patut diperhatikan dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Kondisi birokrat yang memiliki kecakapan, ketrampilan, perilaku yang patuh pada hukum dan peraturan yang berlaku, serta penempatan posisi yang sesuai dengan bidangnya, tentunya akan memberikan dampak yang positif kepada terciptanya pelayanan publik yang berkualitas.

Satu hal lagi yang perlu dicermati dalam upaya peningkatan pelayanan public melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan keprofesionalan pegawai adalah masalah attitude atau perilaku. Diperlukan sikap dan mental yang baik dari setiap aparatur pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat dalam pemberian layanan. Sikap baik ini tentunya bukanlah seperti yang terjadi selama ini, dimana masyarakat dibuat susah dengan adanya pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai yang melayani. Hal ini perlu diperhatikan sebab, seprofesional apapun aparatur penyelenggara pelayanan public, bila memiliki sikap yang bobrok, hanya akan menimbulkan ketidakpuasan lain kepada masyarakat.

b. Menciptakan kebijakan pelayanan publik yang tidak terlalu prosedural dan berbelit-belit.

Langkah selanjutnya sebagai salah satu strategi peningkatan pelayanan publik adalah dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Diharapkan dengan penerbitan kebijakan mengenai peningkatan pelayanan publik itu akan semakin mendorong terciptanya

kualitas pelayanan yang efektif, efisien dan akuntabel. Salah satu tujuan dari pembuatan kebijakan itu juga untuk mengubah image dan citra pelayanan public selama ini yang cenderung berbelit-belit, boros dan memakan waktu yang lama. Sehingga pada akhirnya nanti, masyarakat akan semakin lebih terpuaskan dengan setiap layanan yang dilakukan oleh pemerintah.

Salah satu bentuk kebijakan itu adalah dengan menerbitkan atau membuat standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal merupakan sebuah kebijakan publik yang mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap masyarakat secara minimal. Kebijakan ini juga dibuat seiring dengan diselenggarakannya proses desentralisasi kekuasaan di Negara kita, sehingga dengan mekanisme tersebut masyarakat di tiap daerah mampu mendapatkan pelayanan yang optimal dari pemerintah.

Disamping untuk mempercepat proses pelakasanaan pelayanan publik bagi masyarakat, kebijakan pemerintah dengan menerbitkan standar pelayanan minimal juga bertujuan untuk memberikan jenis pelayanan beserta transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat. Sehingga dengan kebijakan itu, akan menghindarkan perilaku-perilaku menyimpang yang selama ini dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

c. Peningkatan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik.

Selain memperhatikan kedua aspek diatas, salah satu sisi lain yang patut diperhatikan oleh pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan publik adalah dengan meningkatkan penyediaan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan public tersebut. Sebab, tanpa didukung tersedianya fasilitas yang lengkap maka akan menghambat proses penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, maka sudah sepatutnya pemerintah menerapkan kemajuan teknologi itu untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan publik. Peningkatan fasilitas ini tentunya mencakup fasilitas fisik dan non fisik.

Ketersediaan prasarana ini disadari atau tidak akan semakin mempercepat sekaligus meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik. Dan untuk mewujudkannya maka haruslah diperlukan alokasi dana untuk penyediaan sarana dan prasarana tersebut. Dengan begitu maka segala kendala yang menghalangi penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat akan dapat teratasi.

AKREDITASI

SATUAN KERJA	NILAI AKREDITASI / SURVEILLANCE	TANGGAL SERTIFIKAT AKREDITASI/ SURVEILLANCE	KETERANGAN
PN	1. 700	29 November 2017	Akreditasi
PAINANKELAS II	2. 705	10 Maret 2021	Surveillance ke - 4

.....



OPENING MEETING PENILAIAN APM, PEMBANGUNAN RB DAN ZI MENUJU WBK DAN WBBM



CLOSING MEETING PENILAIAN APM, PEMBANGUNAN RB DAN ZI MENUJU WBK DAN WBBM

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENGADILAN NEGERI PAINAN



PELATIHAN PENINGKATAN MUTU PTSP BEKERJASAMA DENGAN BSI PAINAN



APLIKASI ANTRIAN PTSP



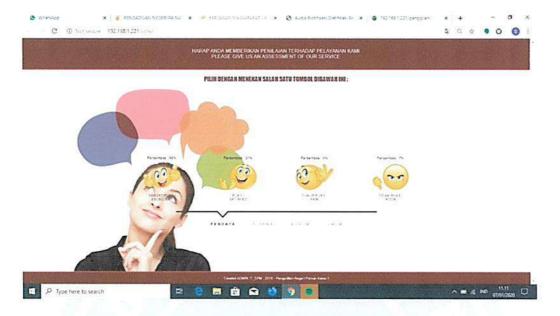
PEMBINAAN PETUGAS PTSP PENGADILAN NEGERI PAINAN OLEH WAKIL KETUA, HAKIM, PANITERA DAN SEKRETARIS

TAMPILAN ANTRIAN PTSP DAN INFORMASI SIDANG





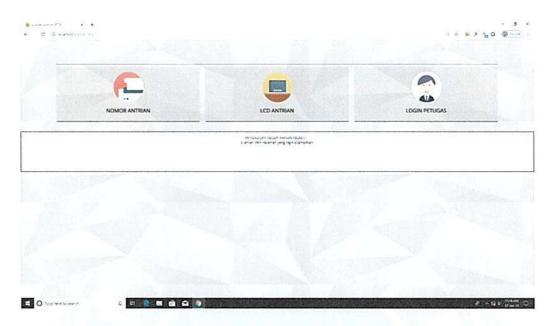
1. AUDIO PERINGATAN ANTI GRATIFIKASI PENGADILAN NEGERI PAINAN



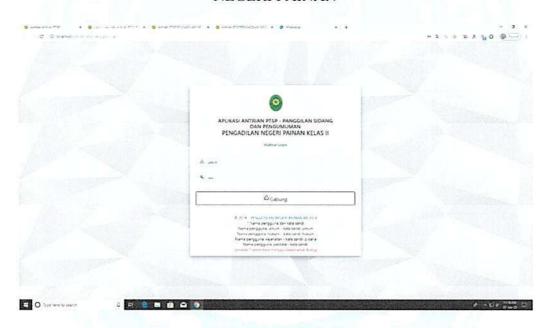
2. SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PENGADILAN NEGERI PAINAN



3. SHORTCUT HOTSPOT PENGADILAN NEGERI PAINAN UNTUK INTERNAL



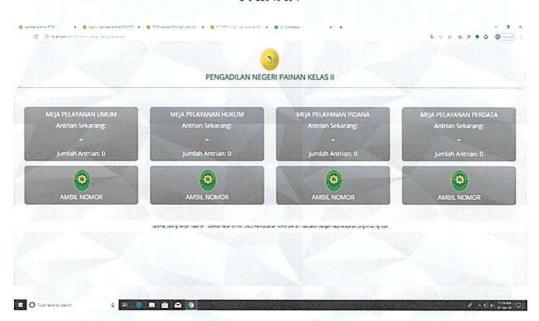
4. APLIKASI ANTRIAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENGADILAN NEGERI PAINAN



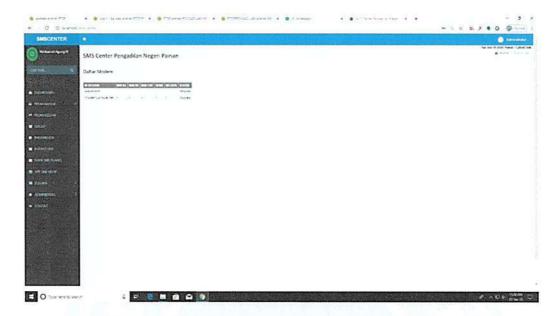
5. HALAMAN LOG IN KHUSUS PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



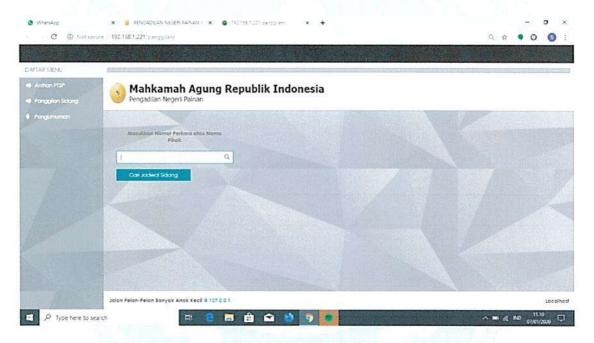
6. TAMPILAN LAYAR TELEVISI INFORMASI PENGADILAN NEGERI PAINAN



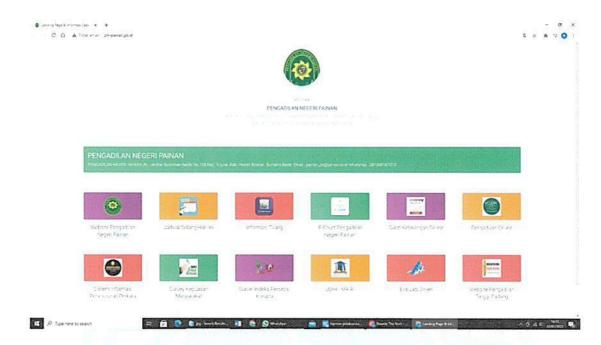
7. TAMPILAN LAYAR ANTRIAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNTUK PENGUNJUNG



8. SHORT MESSAGE SERVIS CENTER PENGADILAN NEGERI PAINAN



9. APLIKASI PANGGILAN SIDANGPENGADILAN NEGERI PAINAN



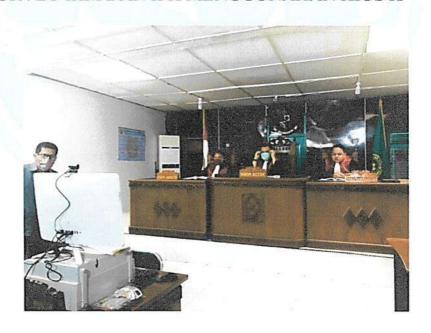
10. LANDING PAGE & INFORMASI CEPAT PENGADILAN NEGERI PAINAN



11. WHATSAPP BUSINESS PENGADILAN NEGERI PAINAN



12. SURVEY IKM DAN IPK MENGGUNAKAN KIOS K



13. SIDANG ONLINE MENGGUNAKAN TELECONFERENCE

BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu:

- Pengawasan melekat.
- Pengawasan Fungsional
- Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukan untuk itu. Di lingkungan lembaga peradilan pengawasan fungsional dilakukan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung.

Pengawasan Rutin/Regular adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Maksud, Tujuan dan Fungsi Pengawasan

1. Maksud Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan dengan maskud untuk:

- Memperoleh informasi apakah pelaksanaan teknis peradilan, pengelolaan administrasi pengadilan dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperoleh umpan balik bagi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- Mencegah terjadi penyimpangan, mall administrasi dan ketidak efisienan penyelenggaraan peradilan.
- Menilai Kinerja.

2. Tujuan Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk mengetahui kenyetaan yang ada sebagai bahan pertimbangan pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkat laku aparat pengadilan dan kinerja pelayan publik pengadilan.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi Pengawasan meliputi:

- Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib.

Dalam pelaksanaan pengawasan internal di Pengadilan Negeri Painan berdasarkan Surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor : W3.U9/99/SK.KP/I/2021 tertanggal 04 Mei 2021 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Painan. Ditambah lagi dengan diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor : W3-U9/157/KP/XII/2021 tertanggal 01 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Audit Internal pada Pengadilan Negeri Painan. Yang akan mengaudit seluruh stake holders yang ada pada Pengadilan Negeri Painan, guna untuk mempertahankan sertifikat akreditasi yang telah didapat oleh Pengadilan Negeri Painan pada bulan September 2017 yang lalu.

Bahwa lembaga pengawasan tersebut telah melakukan tugas pengawasan sesuai dengan bidangnya masing-masing dan memberikan laporan pengawasan kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan selaku pimpinan/Pembina melalui Wakil Ketua Pengadilan Negeri Painan selaku Koordinator Pengawas. Dari hasil laporan pengawasan internal tersebut akan dapat menggambarkan pelaksanaan kegiatan masing-masing bidang baik pada Kepaniteraan maupun untuk Kesekretariatan, guna untuk mengambil arah kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan datang.

PENGAWASAN TAHUN 2021

NO	NAMA KEGIATAN PENGAWASAN	SUBJEK PENGAWAS	OBJEK YANG DIAWASI	WAKTU	ТЕМРАТ	KET
1	Ptip	Hakim	Ptip	Tiap minggu	Pn painan	
2	Umum keuangan	Hakim	Umum keuangan	Tiap minggu	Pn painan	
3	Kortala	Hakim	Kortaka	Tiap minggu	Pn painan	
4	Pidana	Hakim	Pidana	Tiap minggu	Pn painan	V. 100 100 100 V 1
5	Perdata	Hakim	Perdata	Tiap minggu	Pn painan	
6	Hukum	Hakim	Hukum	Tiap minggu	Pn painan	
7	Surveilance	Tim PT padang	Pn painan	Semesteran	Pn painan	



PENGAWASAN MENGGUNAKAN TELECONFERENCE DENGAN PENGADILAN TINGGI PADANG



OPENING MEETING AUDIT INTERNAL PENGADILAN NEGERI PAINAN SEMESTER 2 TAHUN 2021



CLOSING MEETING AUDIT INTERNAL PENGADILAN NEGERI PAINAN SEMESTER 1 TAHUN 2021



FOTO BERSAMA TIM PENGAWAS PT PADANG DAN PN PAINAN NOVEMBER 2021

B. Evaluasi

Evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. Evaluasi kinerja berperan dalam hal apakah seseorang akan diberikan reward atau funisment, Sebelum melaksanakan Evaluasi tentukan harus ditetapkan terlebih dahulu target ataupun sasaran kinerja yang akan kita tuju, sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Pengadilan Negeri Painan juga melakukan evaluasi terhadap hasil kerja yang dapat diukur dari laporan yang ada, laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester, ataupun melalui laporan pelaksanaan kegiatan tahun, baik terhadap administrasi umum maupun administrasi perkara. Pengadilan Negeri Painan, melakukan evaluasi secara rutin terhadap para Hakim, Karyawan/ti terhadap hasil kinerja masing-masing, sebagai contoh dalam hal sebagai berikut:

- Tingkat kedisiplinan Hakim, Karyawan/ti, honorer yang dijabarkan dalam penilaian terhadap ketidakhadiran, keterlambatan, pulang duluan, dan lama waktu kerja.
- 2. Tingkat kemampuan karyawan sebagai suatu bentuk pemenuhan Kebutuhan organisasi untuk memperoleh hasil penyelesaian tugas yang terandalkan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas kinerja yang harus dicapai oleh seorang karyawan.
- 3. Perilaku-perilaku inovatif dan spontan di luar persyaratan-persyaratan tugas formal untuk meningkatkan efektivitas organisasi, antara lain dalam bentuk kerja sama, tindakan protektif, gagasan-gagasan yang konstruktif dan kreatif, pelatihan diri, serta sikap-sikap lain yang menguntungkan organisasi.

Pengadilan Negeri Painan, dalam rangka meevaluasi kinerja seluruh Hakim, Pejabat Struktural/fungsional, staf dan honorer selalu mengadakan rapat dinas secara rutin sedikitnya satu kali dalam sebulan, rapat dinas tersebut dituangkan dalam Berita Acara rapat dinas beserta absensi yang ikut rapat dinas tersebut. Di saat rapat dinas tersebutlah seluruh kedala, permasalahan yang ada dicarikan jalan keluarnya. Dan juga kegiatan yang belum terlaksana sesuai dengan program kerja dibahas untuk dicarikan jalan terbaiknya.

Pada Tahun 2021, Pengadilan Negeri Painan mengadakan rapat dinas rutin setiap bulan yang diikuti oleh keseluruhan Hakim, Karyawan/ti serta tenaga PPNPN. Sedangkan untuk rapat-rapat pimpinan, rapat khusus, dan rapat-rapat lainnya disesuaikan dengan keadaan dan situasi.

Dengan adanya rapat dinas secara rutin ini diharapkan akan dapat meevaluasi kinerja kita setiap bulannya, dan dapat merencanakan kegiatan apa yang akan dikerjakan pada waktu-waktu yang akan datang. Disamping rapat dinas rutin, pada Pengadilan Negeri Painan juga ada melaksanakan rapat-rapat pimpinan pejabat struktural maupun pejabat fungsional yang diadakan sesuai dengan keadaan tertentu dan untuk membahas hal-hal tertentu yang bersifat insidentil.

EVALUASI

NO	NAMA KEGIATAN EVALUASI	SUBJEK EVALUASI	OBJEK EVALUASI	WAKTU	ТЕМРАТ	KET
1	Ptip	Hakim	Ptip	Tiap minggu	Pn painan	
2	Umum keuangan	Hakim	Umum keuangan	Tiap minggu	Pn painan	
3	Kortala	Hakim	Kortaka	Tiap minggu	Pn painan	
4	Pidana	Hakim	Pidana	Tiap minggu	Pn painan	
5	Perdata	Hakim	Perdata	Tiap minggu	Pn painan	
6	Hukum	Hakim	Hukum	Tiap minggu	Pn painan	
7						

BAB VII

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Laporan Pelaksanaan kegiatan tahun merupakan gambaran pelaksanaan administrasi, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan keuangan dari tahun yang telah berjalan. Pada Laporan Pelaksanaan kegiatan tahun 2021 Pengadilan Negeri Painan ini diharapkan dapat mencerminkan seluruh Pelaksanaan kegiatan, baik berupa Administrasi Umum, Administrasi Perkara serta Administrasi keuangan pada Pengadilan Negeri Painan.

Dari uraian laporan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan seluruh kegiatan yang ada dalam DIPA Pengadilan Negeri Painan dan pelaksanaan Administrasi, baik administrasi umum maupun administrasi kepaniteraan telah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan aturan yang ada. dengan adanya laporan ini kiranya dapat menjadikan gambaran pelaksanaan kegiatan untuk masa yang akan datang, semua hambatan dan kendala yang dihadapi pada tahun 2021 merupakan kritikan untuk perbaikan di tahun-tahun kedepannya.

2. REKOMENDASI

Pengadilan Negeri Painan dalam menghadapi tahun 2021 merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Peningkatan sumber daya manusia mutlak diperlukan dalam rangka menghadapi tuntutan perubahan yang begitu cepat utamanya menyangkut penggunaan teknologi informasi. Pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan baik di tingkat pusat maupun daerah menjadi sebuah kebutuhan bagi pegawai Pengadilan Negeri Painan agar selalu terdepan dalam melaksanakan segala kebijakan Mahkamah Agung RI, untuk itu Tenaga Teknis dan Non Teknis pada Pengadilan Negeri Painan diikutsertakan dalam pelatihan yang berkaitan dengan tupoksi masing-masing yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI atau pihak lain yang bekerja sama dengan Mahkamah Agung RI.
- 2. Penggunaan teknologi informasi menuntut adanya kesiapan sarana dan prasarana yang memadai dan berkelanjutan. Oleh karenanya penyusunan postur sarana teknologi informasi mutlak diperlukan dan selanjutnya menjadi acuan bersama Pengadilan Negeri Painan bersama Pengadilan Tinggi Padang dalam penyusunan DIPA. Hal ini penting agar tidak lagi terdengar isu atau permasalahan seputar sarana dan prasarana. Meskipun kenyataannya sarana dan prasarana tersebut tidak dapat dipenuhi seketika namun dengan adanya postur atau arsitektur teknologi informasi pada setiap satker maka terdapat skala prioritas dalam pemenuhan sarana dan prasarana teknologi informasi tersebut khususnya di Pengadilan Negeri Painan.

 Penggunaan SIPP yang optimal, disiplin pegawai yang meningkat pesat, budaya kerja yang mengarah pada budaya kerja modern dan kepatuhan terhadap SOP.

Demikianlah laporan ini dibuat dengan acuan outline yang telah ditetapkan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, atas kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan kegiatan tahun ini akan dipertimbangkan untuk penyusunan Laporan Pelaksanaan kegiatan tahun yang akan datang dan dengan ini diucapkan terima kasih.-



FOTO GEDUNG PENGADILAN NEGERI PAINAN

2021

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGADILAN NEGERI PAINAN

Phone: +62 756 465 215 E-mai: info@pn-painan.go.id Web: www.pn-painan.go.id



PAKTA INTEGRITAS, PERJANJIAN KINERJA, KOMITMEN BERSAMA HAKIM DAN PEGAWAI PENGADILAN NEGERI PAINAN TAHUN 2021



SENAM BERSAMA HAKIM DAN PEGAWAI PENGADILAN NEGERI PAINAN TAHUN 2021



POSBAKUM 2021



KUNJUNGAN SILAHTURAHMI KEPALA LAPAS PESISIR SELATAN



Pelaksanaan Eksekusi damai perkara Perdata NO 12/Pdt.g/1993/PN.Pin sudah berhasil di laksanakan



Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Pengadilan Negeri Painan Kelas II



Ketua PN Painan Menjadi Saksi Dalam Deklarasi Janji Kinerja dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Painan



Kunjungan Bupati Pesisir Selatan Periode 2021-2024 Ke Pengadilan Negeri Painan Kelas II



Silaturahmi Dandim 0311 Pesisir Selatan Ke Pengadilan Negeri Painan Kelas II



Pengadilan Negeri Painan Ikut Dalam Kegiatan Lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang



Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Painan



Public Campaign Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Painan dan Pengendalian gratifikasi



Peringatan HUT IKAHI ke 68 th 2021



Eksekusi Perkara Perdata no 23/Pdt.G/2015/Pn Pnn



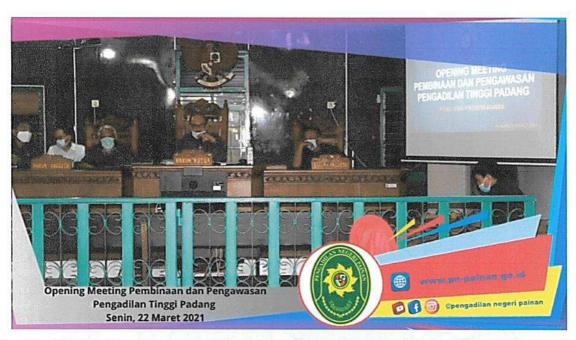
Silaturahmi Nasional Secara Virtual dalam rangka HUT IKAHI ke 68 Bersama YM Ketua MA RI



Silaturahmi Kapolres Pesisir Selatan AKBP. Sri Wibowo.S.lk Dengan Ketua Pengadilan Negeri Painan



Ketua Tim dan Para Koordinator Area Pembangunan ZI PN Painan Mengikuti Kegiatan Entry
Meeting - Desk Evaluation Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Menuju
Wilayah Bebas Korupsi (WBK)



Opening Meeting Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan Tinggi Padang kepada Pengadilan Negeri Painan



Closing Meeting Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan Tinggi Padang kepada Pengadilan Negeri Painan



Pencanangan WBK WBBM Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan



Sosialisasi Implementasi SAKTI, Marketplace dan Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2021 Yang Di Selenggarakan KPPN Painan



Perjanjian Kerjasama Penanganan Overstaying Antara Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Painan Dengan Pengadilan Negeri Painan



Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis Kepaniteraan Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2021



Bimbingan Teknis Kepegawaian dan Keuangan Peradilan Umum Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang



Penyerahan Kartu Debet Virtual Akun Dipa 01 Dengan BRI Painan



EKSEKUSI PERKARA PERDATA NO. 4/Pdt.G/2017/PN Pnn



SAFARI RAMADHAN DI MASJID NURUL HUDA TARUSAN



Kunjungan Silaturahmi Bupati PESSEL Ke KPN Painan Dalam Rangka Hari Raya Idul Fitri 1442



RAPAT BULANAN JUNI 2021



MONITORING DAN EVALUASI TENAGA HONORER



KIMWASMAT Periode Januari s/d Juni 2021



PELAKSANAAN UJIAN DINAS ELEKTRONIK (e-EXAM)



OPENING MEETING AUDIT INTERNAL



PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH PANITERA MUDA PIDANA





PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN



Rapat Kerja Internal Pembangunan Zona Integritas (ZI) Pengadilan Negeri Painan menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021



MUHAMAD FAUZAN HARYADI, S.H., M.H.
MENGHADIRI UPACARA VIRTUAL DETIK - DETIK
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA BERSAMA
BUPATI, WAKIL BUPATI DAN FORKOPIMDA
PESISIR SELATAN BERTEMPAT DI PCC

17 AGUSTUS 2021



Upacara Detik - Detik Kemerdekaan Republik Indonesia ke - 76 Secara Virtual di Painan Convention Center



17 AGUSTUS 2021



Upacara Detik - Detik Kemerdekaan Republik Indonesia ke - 76 Secara Virtual di Pengadilan Negeri Painan











19 AGUSTUS 2021









PERAYAAN HARI ULANG TAHUN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KE - 76 DI PENGADILAN NEGERI PAINAN



KNOWLEDGE SHARING BERBAGI PENGALAMAN MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK



Pelatihan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2021



15 SEPTEMBER 2021

Penandatanganan MoU Kerjasama Media Informasi Layanan Pengadilan Negeri Painan dan Launching Aplikasi PN Painan Mobile



∰ WWW.PN-PAINAN.GO.ID



(i) (ii) PENGADILAN NEGERI PAINAN

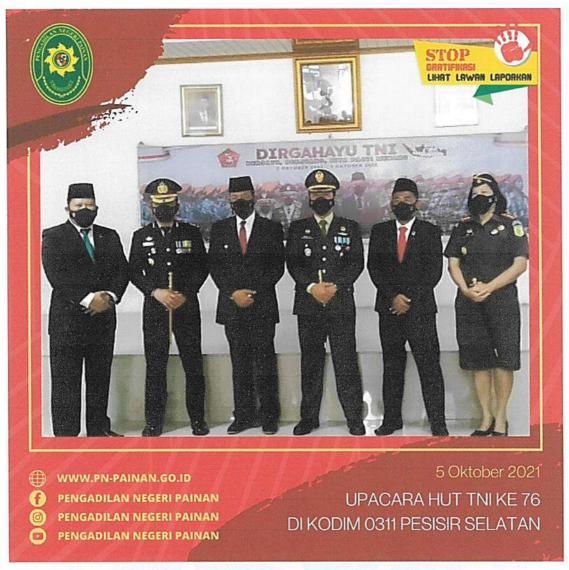
Penandatanganan MoU Kerjasama Media Informasi Layanan Pengadilan Negeri Painan dan Launching Aplikasi PN Painan Mobile



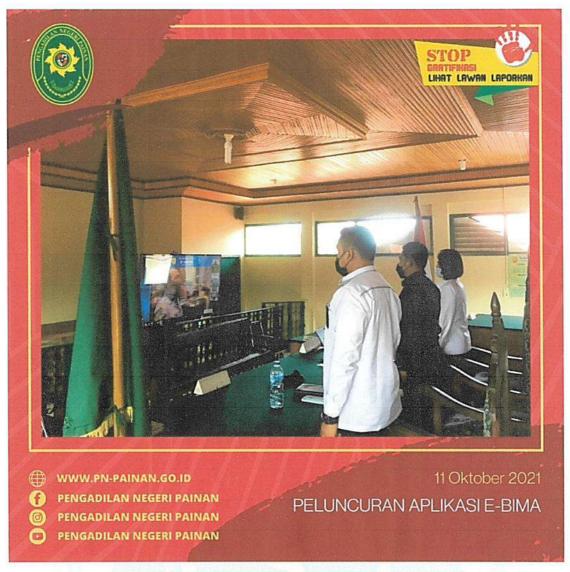
Eksekusi Perkara Perdata No 4/Pdt.G/1997/PN Pin



HUT Dharmayukti Karini XIX



UPACARA HUT TNI KE 76 DI KODIM 0311 PESISIR SELATAN



PELUNCURAN APLIKASI E-BIMA MAHKAMAH AGUNG



Bimtek dan Sosialisasi Tata Cara Pemotongan luran Jaminan Kesehatan Bagi Anggota Keluarga Yang Lain dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Satker Lingkup KPPN Painan



GEBYAR VAKSINASI MASSAL DAN BAKTI SOSIAL PESISIR SELATAN DI POLSEK LUNANG SILAUT



Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM dari Mahkamah Agung RI Pada Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Se-Wilayah Hukum Sumatera Barat



Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI, Bagi Jajaran Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia



Tumamen Tenis KPT CUP Tahun 2021



Pengantar Alih Tugas Bapak Feryandi, S.H., dan Ibu Sukma Triana Sari, S.H.





PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN NO 15/Pid.C/2021/PN Pnn



UPACARA PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA KE 93 | PEMKAB PESISIR SELATAN



KICK OFF MEETING PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT TUJUAN TERTENTU ATAS PENANGANAN PERKARA PADA BADAN PERADILAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG



KUNJUNGAN KERJA PANGLIMA TNI DAN KAPOLRI DALAM RANGKA PENINJAUAN VAKSINASI DI SUMATERA BARAT 3 NOVEMBER 2021



KUNJUNGAN KERJA PANGLIMA TNI DAN KAPOLRI DALAM RANGKA PENINJAUAN VAKSINASI DI SUMATERA BARAT



PEMBINAAN DAN DISKUSI TEKNIS PENGADILAN NEGERI SE - SUMATERA BARAT 4 NOVEMBER 2021



PEMBINAAN DAN DISKUSI TEKNIS PENGADILAN NEGERI SE - SUMATERA BARAT



UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN KE - 76 DI KABUPATEN PESISIR SELATAN 10 NOVEMBER 2021







UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN KE-76 | KABUPATEN PESISIR SELATAN



RAPAT BERJENJANG BAGIAN KESEKRETARIATAN 10 NOVEMBER 2021



RAPAT BERJENJANG BAGIAN KESEKRETARIATAN



PEMAPARAN HASIL AUDIT TUJUAN TERTENTU ATAS PENANGANAN PERKARA OLEH BPKP 11 NOVEMBER 2021



PEMAPARAN HASIL AUDIT TUJUAN TERTENTU ATAS PENANGANAN PERKARA OLEH BPKP



PENGUKUHAN DAN PELEPASAN KAFILAH MTQ KABUPATEN PESISIR SELATAN KE - XXXIX 11 NOVEMBER 2021



PENGUKUHAN DAN PELEPASAN KAFILAH MTQ KABUPATEN PESISIR SELATAN KE XXXIX



KIMWASMAT KE RUTAN PAINAN

12 NOVEMBER 2021









KIMWASMAT KE RUTAN PAINAN



OPENING MEETING PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENGADILAN TINGGI PADANG KEPADA PENGADILAN NEGERI PAINAN 15 NOVEMBER 2021



OPENING MEETING PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENGADILAN TINGGI PADANG KEPADA PENGADILAN NEGERI PAINAN



CLOSING MEETING
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENGADILAN TINGGI PADANG
KEPADA PENGADILAN NEGERI PAINAN
16 NOVEMBER 2021



CLOSING MEETING PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENGADILAN TINGGI PADANG KEPADA PENGADILAN NEGERI PAINAN



APEL GABUNGAN TIGA PILAR DALAM RANGKA PERCEPATAN VAKSIN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN 17 NOVEMBER 2021









APEL GABUNGAN TIGA PILAR DALAM RANGKA PERCEPATAN VAKSIN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN



RAPAT BULANAN

17 NOVEMBER 2021



RAPAT BULANAN NOVEMBER 2021



PENYERAHAN DIPA DAN TKDD TAHUN ANGGARAN 2022



PERESMIAN TRANSFORMASI SIPERMARI MENJADI E-SADEWA



PENYERAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) TAHUN ANGGARAN 2022 OLEH KPPN PAINAN



BIMBINGAN TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PNBP



PENERIMAAN MAHASISWA PPL STAI BALAISELASA TAHUN AKADEMIK 2021/2022



EKSEKUSI PERKARA PERDATA NO 28/Pdt.G/2018/PN Pnn



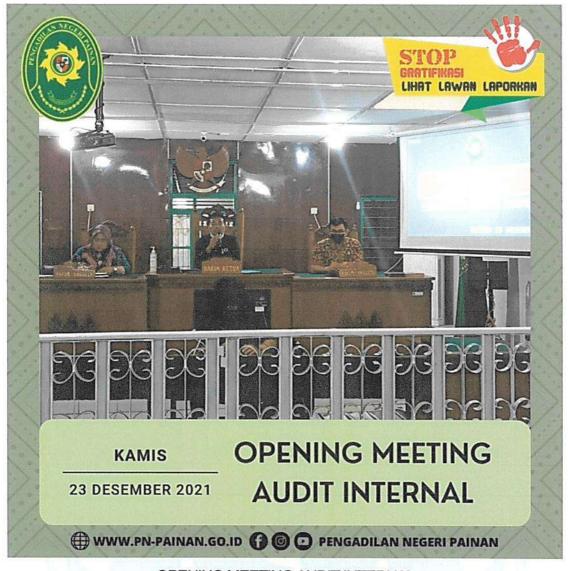
Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI, Bagi Jajaran 4 Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia



SOSIALISASI APLIKASI E-SADEWA SECARA VIRTUAL



RAPAT BULANAN DESEMBER 2021



OPENING MEETING AUDIT INTERNAL



SELEKSI TAHAP II POSBAKUM PENGADILAN NEGERI PAINAN TAHUN ANGGARAN 2022